



Analisis Faktor Pemicu Selisih Anggaran dengan Pendapatan Direktorat Jendral Hortikultura

¹Patrisya Putri Utami, ²Amira Dwi Aryani, ³Nur Aini Putri Daryanti, ⁴Siti Hindun, ⁵Azahra Elsa Mayori

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Alamat : Jl. Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

Korespondensi penulis: ami.briliana06@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the budget and the factors triggering the budget variance in the Directorate General of Horticulture, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Inaccuracies in budget planning and management can lead to deficits that affect operations and the success of programs. This research uses secondary data in the form of budget realization reports from 2020, with descriptive analysis methods to illustrate the variance between the budget and revenue. The results show that fluctuations in commodity prices, policy changes, and inaccuracies in budget planning are the main factors influencing the variance between the budget and realized revenue. Achieving revenue that exceeds the budget can indicate efficiency in resource management, but significant variances also suggest the need for improvements in budget planning in the future. Therefore, it is crucial for government agencies to conduct careful risk analysis and prepare realistic budgets to minimize undesired variances and enhance accountability in the management of public finances.*

Keywords: *budget, variance, revenue, Directorate General of Horticulture.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan anggaran dan faktor-faktor pemicu selisih anggaran di Direktorat Jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketidakakuratan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat menyebabkan defisit yang mempengaruhi operasional dan keberhasilan program. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari tahun 2020, dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan selisih anggaran dan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan, dan ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan. Pencapaian pendapatan yang melebihi anggaran dapat menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, namun selisih yang signifikan juga dapat mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk melakukan analisis risiko yang cermat dan penyusunan anggaran yang realistis untuk meminimalkan selisih yang tidak diinginkan serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: selisih, anggaran, pendapatan, Direktorat Jenderal Holtikultura,

1. LATAR BELAKANG

Pada umumnya setiap perusahaan, organisasi, atau badan usaha memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam aspek sarana dan prasarana, pelayanan, dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan meminimalkan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam proses operasional. Ketidakakuratan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat menyebabkan defisit. Selisih antara anggaran dan pendapatan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian keuangan. Memahami faktor-faktor

yang mempengaruhi selisih tersebut membantu manajemen untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Direktorat Jendral Hortikultura adalah sebuah unit kerja dibawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan dan pengelolaan sektor hortikultura di Indonesia. Direktorat Jendral Hortikultura berperan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan di bidang hortikultura untuk meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing produk hortikultura Indonesia. Direktorat Jendral Hortikultura juga berperan vital dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor hortikultura, pengelolaan anggaran yang efisiensi sangat penting. Dengan menganalisis faktor yang memicu, diharapkan dapat memperbaiki proses perencanaan anggaran. Hal ini memungkinkan pembuatan anggaran yang realistis dan sesuai dengan kondisi pasar. Fluktuasi ekonomi, termasuk harga komoditas pertanian, dapat mempengaruhi pendapatan, perubahan kebijakan atau regulasi dapat berdampak langsung pada pendanaan dan pendapatan.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis ingin menganalisis penerapan anggaran dan realisasinya serta faktor pemicu yang mengakibatkan selisih anggaran di Direktorat Jendral Hortikultura.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Anggaran

Menurut M. Fuad dkk (2020:2) mendefinisikan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan seluruh Perusahaan untuk suatu periode tertentu di masa depan.

Menurut Suhardi (2019:3) budget dapat diartikan anggaran, yaitu merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku, pada periode tertentu dimasa mendatang.

Menurut Sasongko & Parulian (2020:2) anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. (Fuad, 2020)

Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan laporan laba dan rugi perusahaan. Pendapatan dihitung dengan mengalikan harga penjualan rata-rata dengan jumlah unit yang terjual. Angka pendapatan kotor dikurangi biaya untuk menentukan laba bersih.

Menurut Firmansyah (2020) pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitya kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke public melalui saham untuk menarik investor. (Realisasi et al., 2023)

Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disingkat IAI (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Menurut Harmanto (2019) menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sochib (2018) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjelaskan bahwa pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan, kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Dalam PSAK No. 23 pernyataan ini harus ditetapkan dalam akuntansi untuk pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa seperti penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty dan dividen.

Dilihat dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh Perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu Perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. (SHELEMO, 2023)

Pengertian Realisasi

Menurut Firmansyah (2020) realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Di bidang akuntansi realisasi bermakna “Uang” yaitu konversi aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang yang melalui tahapan penjualan. Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, akuntansi, pemasaran, dan lain sebagainya untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah dirai untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Dalam bidang akuntansi dikenal dengan laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pada suatu instansi yang berisi informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, serta kemana penggunaan dana tersebut dalam satu periode beberapa hal yang wajib disertakan dalam sebuah laporan realisasi diantaranya pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, penerimaan, pembiayaan pengeluaran, pembiayaan neto serta sisa pembiayaan anggaran (apakah kekurangan atau kelebihan).

Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, akuntansi, pemasaran dan lain sebagainya untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah diraih untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Indra Bastian (2012) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode.

Menurut PP No. 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. (BPK, 2010)

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar

sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih Panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan menggunakan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2007;85) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. (Chen et al., 2018)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kami menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen, rapat dan lain lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer. Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa daftar Laporan Realisasi Anggaran.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis mengenai selisih anggaran dengan pendapatan Direktorat Jendral Holtikultura.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efektivitas alokasi anggaran menjadi salah satu indikator penting keberhasilan suatu program. Selisih antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pendapatan seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jendral Holtikultura. Berikut ini data anggaran dan realisasi dari Direktorat Jendral Holtikultura Periode 2019 dan 2020. (I-tura, n.d.)

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jendral Holtikultura

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.252.995.000	5.629.091.715	250	7.405.060.655
Jumlah Pendapatan		2.252.995.000	5.628.741.715	250	7.405.060.655
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	25.204.236.000	22.840.960.376	91	23.643.998.416
Belanja Barang	B.3	583.080.766.000	544.085.558.669	93	914.738.456.670
Belanja Modal	B.4	12.196.900.000	11.946.954.920	98	6.293.693.650
Jumlah Belanja		620.481.902.000	578.873.473.965	93	944.676.148.736

Sumber: Laporan Keuangan Semester II Audited Kementerian Pertanian, 2020.

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp 5.629.091.715 dengan persentase capaian sampai dengan 250% dari anggaran sebesar Rp 2.252.995.000. Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki realisasi sebesar Rp 7.405.060.655, realisasi 2020 masih dibawah realisasi tahun 2019. Adapun demikian, peningkatan realisasi ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan dari sumber-sumber non-pajak seperti perizinan, retribusi, penjualan produk hortikultura, atau pendapatan lainnya.

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember

Direktorat Jendral Holtikultura

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	1.675.645.000	2.361.137.623	140,91
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0,00	305.805.411	
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	57.000.000	0,00	
Pendapatan Jasa Lainnya	519.850.000	181.850.040	34,98
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Pengelolaan Keuangan	0,00	1.016.432.085	
Pendapatan Denda	0,00	330.490.731	
Pendapatan Lain - Lain	0,00	1.433.375.825	
Jumlah	2.197.310.000	5.629.091.715	249,85

Sumber: Laporan Keuangan Semester II Audited Kementerian Pertanian, 2020.

Berdasarkan tabel 2 di atas realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan iuran badan usaha adalah sebesar Rp 2.361.137.623 dengan persentase 140,91% dari anggaran sebesar Rp 1.675.645.000. Pendapatan ini berasal dari penjualan hasil pertanian, perkebunan dan budidaya, serta hasil produksi non litbang lainnya. Pendapatan administrasi dan penegakan hukum berasal dari perizinan pertanian, pengujian, sertifikasi dan lainnya mendapatkan realisasi sebesar Rp 305.805.411. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp 181.850.040 merupakan pendapatan jasa pengawasan/pemeriksaan. Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp1.016.432.085 yang merupakan setoran atas penyelesaian Kerugian Negara. Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 330.490.731. Realisasi Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp.1.433.375.825.

Pendapatan dari sektor hortikultura dapat sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas atau hasil pertanian yang dijual. Kenaikan harga atau volume penjualan yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dapat menyebabkan realisasi pendapatan yang lebih tinggi, seperti

yang terjadi pada penjualan hasil pertanian dan perkebunan. Terkadang, efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dari data yang ada dapat terlihat bahwa pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) atau iuran badan usaha yang baik dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, pendapatan yang bersumber dari kategori lain, seperti pendapatan bunga atau denda, mungkin juga tidak dapat diprediksi dengan tepat karena bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan yang dapat berubah-ubah.

Salah satu faktor yang cukup mendasar selisih antara anggaran dan realisasi adalah ketidaktepatan dalam merencanakan anggaran. Jika anggaran ditetapkan terlalu optimis atau pesimis, maka akan terjadi perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi. Hal ini bisa terkait dengan asumsi yang tidak tepat tentang pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, atau proyeksi pendapatan lainnya.

Selisih antara anggaran dan realisasi dalam pengelolaan keuangan, seperti yang terjadi pada Direktorat Jendral Holtikultura, dapat menimbulkan berbagai dampak baik dari segi pengelolaan anggaran, operasional instansi pemerintah, maupun efektivitas program yang dilaksanakan. Dampak-dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sifat dan arah selisih anggaran tersebut.

Jika realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran, maka ada lebih banyak dana yang tersedia untuk mendanai program-program lainnya, baik yang sudah direncanakan maupun program darurat yang mungkin muncul. Pendapatan yang lebih tinggi dari PNBPN dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan lain yang juga penting bagi sektor pertanian dan hortikultura.

Pencapaian pendapatan yang melebihi target dapat menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pengumpulan pendapatan non-pajak. Ini dapat meningkatkan citra Direktorat Jendral Holtikultura di mata publik dan pemangku kepentingan, termasuk meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan pengelolaan keuangan negara.

Selisih anggaran yang cukup besar bisa memberi gambaran bahwa perencanaan anggaran perlu diperbaiki. Hal ini dapat mendorong kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data untuk tahun-tahun berikutnya, dengan menghindari over-estimasi atau under-estimasi dalam anggaran pendapatan.

Jika realisasi pendapatan jauh melebihi anggaran yang direncanakan (seperti dalam kasus PNBPN), maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Ini berpotensi mengarah pada pemborosan atau ketidakcocokan dalam distribusi dana untuk prioritas yang sebenarnya lebih membutuhkan. Perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi dapat menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan, karena pihak yang bertanggung jawab mungkin kesulitan menyesuaikan alokasi sumber daya berdasarkan realisasi yang tidak sesuai dengan proyeksi awal. Ini juga bisa mengganggu kestabilan operasional, seperti penundaan atau perubahan alokasi anggaran untuk program-program yang sudah ditetapkan.

Selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasi akan memicu perlunya pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Pemerintah atau badan pengawasan mungkin akan menuntut penjelasan lebih rinci tentang perbedaan tersebut dan tindakan korektif yang perlu diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di masa depan. Jika selisih tersebut besar, perlu adanya penyesuaian anggaran yang dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam merencanakan alokasi dana untuk tahun berikutnya. Perubahan anggaran yang sering dan mendalam bisa menurunkan kredibilitas serta efektivitas anggaran dalam memenuhi sasaran program pemerintah.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, faktor-faktor pemicu seperti perubahan ekonomi, kebijakan, administrasi, fluktuasi harga komoditas, dan perencanaan anggaran yang tidak akurat memiliki korelasi langsung dengan selisih anggaran. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan selisih positif (pendapatan lebih tinggi dari anggaran) atau selisih negatif (pendapatan lebih rendah dari anggaran), tergantung pada bagaimana kondisi-kondisi tersebut terwujud. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk melakukan analisis risiko yang baik dan penyesuaian anggaran yang realistis untuk meminimalkan selisih yang tidak diinginkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chen, X. X. X. X., Tsai, M. Y., Wolynes, P. G., da Rosa, G., Grille, L., Calzada, V., Ahmad, K., Arcon, J. P., Battistini, F., Bayarri, G., Bishop, T., Carloni, P., Cheatham, T. E., Collepardo-Guevara, R., Czub, J., Espinosa, J. R., Galindo-Murillo, R., Harris, S. A., Hospital, A., ... Crothers, D. M. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. <https://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008>
- Dinas, P., Kab, K., & Barat, L. (2025). Analisis faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dengan realisasi (pp. 1–9).
- Fuad, M. (2020). Tinjauan Pustaka.
- I-tura, H. (n.d.). ENDERAL HORTIKU I-TURA.
- Marzalita, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 46–58.
- Realisasi, S., Tahun, P., & Rani, P. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan realisasi pendapatan pada PDAM Kabupaten Majene tahun 2018-2022. *Program Studi Akuntansi Universitas Sulawesi Barat*.
- Sabaria. (2018). Skripsi oleh Sabaria, Program Studi Akuntansi.
- Shelemo, A. A. (2023). No Title. *Nuclear Physics*, 13(1), 104–116.
- Simanjuntak, P. A. H. (2022). Analisis faktor terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 36–43. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8040>
- Tulangow, A. P., & Ilat, V. R. (2014). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.
- Vela, M., Olin, L., Herdi, H., Eo, E., & Goo, K. (2024). Analisis faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dengan realisasi pendapatan, laba, dan biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Ilmiah*, 3(22), 369–386.